

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pada saat ini sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta memperhatikan *value for money*.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi satu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokrasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Mahmudi (2009) mengatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Pada umumnya setiap instansi berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan instansi, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan instansi dalam mencapai tujuannya, maka setiap instansi senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerjanya.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang.

Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini

disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Berdasarkan dari kenyataan yang ada di lingkungan pemerintah, permasalahan yang sering timbul yaitu mengenai Rendahnya akuntabilitas anggaran publik, terutama jika disoroti dari proses perumusan APBD dan realisasinya, terbukti dari tiga fenomena pokok. Pertama, perumusan APBD sejauh ini masih di dikte oleh kepentingan politik para elit pejabat di daerah, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, kepentingan untuk memakmurkan rakyat seringkali terpinggirkan. Kedua, prioritas belanja daerah ternyata masih sangat dipengaruhi alokasi untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk membuat program-program yang responsif bagi rakyat di daerah. Kecenderungan seperti ini sesungguhnya sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru, di mana Subsidi Daerah Otonom selalu menyedot dana publik yang proporsinya begitu besar. Ketiga, kurangnya kemampuan perencanaan dan penganggaran diantara para pegawai Pemda dan semakin ketatnya ketentuan pengadaan barang dan jasa mengakibatkan semakin besarnya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Akibatnya, sekali lagi semakin banyak dana APBD yang kurang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat karena tidak bisa dibelanjakan secara efektif, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tersebut, terutama dengan melihat aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan segala kegiatan instansi, maka dibutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan di dalam anggaran. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan dalam membiayai seluruh kegiatan Instansi, sehingga sangat penting penyusunan anggaran dengan baik dalam rangka untuk membiayai operasional instansi dan untuk melihat sejauh mana anggaran biaya operasional dengan realisasinya. Hal tersebut sejalan dengan anggaran Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Manado yang merupakan salah satu aspek penting di dalam merencanakan keputusan yang akan diambil oleh manajemen, sehingga apabila terjadi

kekeliruan atau ketidaktepatan dalam merencanakan atau melaksanakan anggaran dapat berakibat buruk bagi instansi.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan realisasinya pada Dinas BMKG Manado.

Keterangan	Anggaran Pendapatan	Realisasi	Prosentase Pencapaian
Penerimaan Pajak	761.540.700	773.054.800	101,51 %
Penerimaan Negara bukan Pajak	1.845.351.000	1.914.186.800	103,99 %
Lain-lain pendapatan yang sah	79.000.000	81.000.000	175,75 %
Jumlah Penerimaan	2.792.688.300	2.945.115.600	104,02 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa kinerja Dinas BMKG Manado dapat dikatakan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata anggaran mencapai 104,02%. Persentase paling rendah terdapat pada penerimaan Pajak yaitu sebesar 101,51%. Semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Rangka Mengukur Kinerja Dinas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Manado”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas BMKG Manado menggambarkan kinerja keuangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola anggaran belanja dan realiasi BMKG Manado.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Dinas BMKG Manado tahun 2015.
3. Untuk mengukur keberhasilan Dinas BMKG dalam mencapai program.
4. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penyebab Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BMKG Manado dikatakan meningkat atau menurun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan pada entitas pemerintah daerah Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Manado adalah :

1. Bagi peneliti, untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja pada organisasi sektor publik.
2. Bagi instansi, untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah atas Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka mengukur kinerja instansi.
3. Bagi politeknik, diharapkan dapat menjadi bahan-bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang sejenis yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka mengukur kinerja Instansi Pemerintah.